



Analysis Of Financial Performance On The Realization Of Regional Revenue And Expenditure Budget Reports In The Provincial Government Of North Sumatra For The Year 2019-2022

Analisis Kinerja Keuangan Terhadap Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2022

Putri Salsabila Siregar ¹⁾; Junawan ²⁾; Dito Aditia Darma Nasution ³⁾

^{1,2,3)} Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: ¹⁾putriisalsabilasrg@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [22 Maret 2026]

Revised [27 April 2026]

Accepted [30 April 2026]

KEYWORDS

Financial Performance, Local Own-Source Revenue (PAD), and the Government Budget.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2019 hingga 2022, dengan fokus pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Analisis dilakukan menggunakan rasio keuangan, termasuk efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi keuangan, dan kemandirian fiskal, untuk menilai kinerja anggaran. Hasil penelitian menunjukkan adanya fluktuasi dalam realisasi pendapatan dan belanja, dengan tren positif pada efektivitas PAD yang melebihi target pada tahun 2021 dan 2022. Temuan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan pendapatan, meskipun di tengah tantangan seperti pandemi COVID-19. Penelitian ini menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang efisien untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan memastikan kemandirian fiskal.

ABSTRACT

This study examines the financial performance of the Government of North Sumatra from 2019 to 2022, focusing on the Revenue and Expenditure Realization Reports (LRA). The analysis uses financial ratios, including the effectiveness of Local Revenue (PAD), financial efficiency, and financial independence, to evaluate budget performance. Findings reveal that the government faced fluctuations in revenue and expenditure realizations, with notable trends in PAD effectiveness, which exceeded planned targets in 2021 and 2022. These outcomes underscore improvements in the local government's ability to manage and optimize revenue, even amidst challenges such as the COVID-19 pandemic. The study emphasizes the importance of efficient financial management for sustaining development and ensuring fiscal autonomy.

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola keuangan untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan pelayanan publik yang efektif. Salah satu instrumen penting untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA). LRA mencatat pendapatan dan belanja yang direncanakan serta yang terealisasi selama satu periode anggaran, yang menjadi acuan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Saputra et al., 2020). Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah sebagai pembaharuan dan penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah sebelumnya. Menurut Peraturan Pemerintah tersebut berisi dan menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah segenap unsurnya untuk segera menyusun dan menerapkan sistem akuntansi dalam mencatat dan melaporkan transaksi keuangannya (Nasution & Junawan, 2019).

Dalam konteks Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, meskipun anggaran telah direncanakan dengan cermat, kenyataannya terdapat fluktuasi dalam pencapaian pendapatan dan belanja daerah setiap tahun. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara target anggaran dengan realisasinya, yang berpotensi mengganggu kestabilan fiskal dan pencapaian tujuan pembangunan daerah (Halim & Kusufi, 2018). Fenomena ini lebih terasa pada tahun 2020 dan 2021, ketika pandemi COVID-19 mengganggu perekonomian dan mempengaruhi pencapaian pendapatan daerah, seperti yang tercatat dalam LRA.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan beberapa rasio keuangan, seperti rasio efektivitas PAD (Pendapatan Asli Daerah), rasio efisiensi, dan rasio kemandirian fiskal. Analisis rasio ini penting untuk mengetahui sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola anggaran secara efektif dan efisien, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target anggaran (Riswati & Bukhori, 2023).

Motivasi utama dari penelitian ini adalah pentingnya memahami bagaimana pemerintah daerah mengelola keuangan daerah, mengingat kinerja keuangan yang baik akan mendukung kelancaran pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai pengelolaan keuangan daerah dan menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan fiskal di masa depan. Dalam konteks ini, analisis kinerja keuangan umumnya dilakukan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan sektor publik, seperti rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, serta pertumbuhan pendapatan dan belanja daerah. Laporan Realisasi Anggaran menjadi dasar penting karena menyajikan perbandingan antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya dalam satu periode tertentu, sehingga dapat menggambarkan tingkat pencapaian target keuangan pemerintah daerah. Selain itu, teori akuntansi sektor publik menekankan pentingnya prinsip akuntabilitas, transparansi, dan value for money dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, analisis terhadap LRA Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019–2022 dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja keuangan daerah, termasuk kemampuan dalam mengelola sumber daya keuangan secara optimal serta mengidentifikasi potensi perbaikan dalam pengelolaan anggaran di masa mendatang.

LANDASAN TEORI

Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek yang sangat penting dalam tata kelola pemerintahan, yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu instrumen utama yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. LRA berfungsi untuk menunjukkan sejauh mana pendapatan dan belanja yang direncanakan dapat direalisasikan serta memberikan gambaran tentang efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran daerah (Halim & Kusufi, 2018). Dalam penelitian ini, kinerja keuangan daerah akan dianalisis melalui beberapa rasio keuangan, yang mencakup rasio efektivitas PAD (Pendapatan Asli Daerah), rasio efisiensi, dan rasio kemandirian fiskal, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan.

Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan daerah adalah salah satu indikator utama untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah dapat mengelola sumber daya keuangan yang ada untuk mencapai tujuan pembangunan. Menurut Nasution (2018) Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan dalam bentuk uang maupun barang yang dapat dijadikan milik daerah, yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurut Mahmudi (2019), kinerja keuangan daerah dapat dianalisis menggunakan rasio keuangan yang mencerminkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran. Rasio-rasio tersebut termasuk rasio kemandirian keuangan, efektivitas PAD, serta efisiensi dalam penggunaan anggaran. Kinerja yang baik akan tercermin dari kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan daerah secara optimal dan mengalokasikan anggaran dengan efisien untuk mendukung pembangunan.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA adalah laporan yang menyajikan perbandingan antara anggaran yang direncanakan dengan anggaran yang telah terealisasi dalam suatu periode. LRA digunakan untuk menilai apakah pengelolaan anggaran daerah telah dilakukan sesuai dengan rencana dan apakah terdapat ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasinya. LRA juga mencerminkan tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Saputra et al., 2020). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, LRA memiliki dua fungsi utama: sebagai alat evaluasi kinerja anggaran dan sebagai instrumen pengendali anggaran untuk memastikan penggunaan dana publik dilakukan dengan efisien.

Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan komponen vital dalam struktur keuangan pemerintah daerah, karena mencerminkan seluruh penerimaan yang menjadi hak daerah dan secara sah diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu periode anggaran (Habiburrahman & Imani, 2016). Dengan kata lain, pendapatan daerah menjadi sumber utama pembiayaan bagi pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah gambaran kuantitatif tentang tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi unit kerja harus disusun dalam struktur yang berorientasi pada pencapaian tingkat kinerja tertentu (Chrisna, 2024)



Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam suatu periode anggaran. Dalam konteks keuangan daerah, belanja tidak hanya menjadi komponen pengeluaran, tetapi juga cerminan dari kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan yang diambil oleh pemerintah daerah (Afnan et al., 2020).

Analisis Rasio Keuangan Daerah

Analisis rasio keuangan merupakan alat penting yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah secara lebih objektif dan terukur. Melalui rasio-rasio ini, dapat diketahui tingkat kemandirian fiskal, efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan, serta arah kebijakan belanja pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Analisis Rasio Keuangan Daerah

Menurut (Sofyan, 2022) rasio kinerja keuangan pemerintah terdiri dari berbagai analisis rasio yaitu:

Rasio Efektivitas

Menurut Halim dan Kusufi (2014), efektivitas merupakan indikator yang menunjukkan sejauh mana sebuah organisasi berhasil mencapai tujuannya. Ketika suatu organisasi mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, hal tersebut menandakan bahwa organisasi tersebut beroperasi dengan efektif.

Sementara itu, Mahmudi (2016) menyatakan bahwa rumus untuk menghitung rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara total realisasi pengeluaran (belanja daerah) dan realisasi pendapatan yang diterima (Abdul Halim, 2012). Kinerja pemerintah daerah dalam pemungutan pendapatan dapat dikatakan efisien apabila rasio efisiensi yang diperoleh kurang dari satu atau di bawah 100 persen. Semakin rendah nilai rasio efisiensi tersebut, semakin baik pula kinerja pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk menghitung secara cermat biaya yang dikeluarkan dalam upaya mencapai target pendapatan, guna menilai sejauh mana kegiatan pemungutan tersebut dilakukan secara efisien. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio efisiensi keuangan daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Keserasian

Menurut (Halim, 2004), Rasio Keserasian merupakan gambaran untuk melihat bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dana pada Belanja rutin ataupun Operasi dan Belanja Pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentasi alokasi dana untuk Belanja Rutin menunjukkan semakin kecil presentasi belanja pembangunan yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat. Terdapat dua rumus perhitungan dalam Rasio Keserasian ini, yakni Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal.

Menurut , (Mahmudi, 2016) Rasio Belanja Operasi adalah hasil dari perbandingan antara Total Belanja Operasi dengan Total Belanja Daerah. Rasio tersebut memberikan informasi kepada pembaca laporan tentang porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk Belanja Operasi. Kemudian belanja Operasi adalah belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, dapat dikatakan sifatnya jangka pendek dan dalam kasus tertentu sifatnya dapat rutin atau berulang. Umumnya Belanja Operasi mendominasi total belanja daerah proporsinya, yaitu antara 60-90 %. Jika tingkat pendapatan tinggi maka cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi juga jika dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah. Rumus Rasio Belanja Operasi dirumuskan yaitu :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100$$

Rasio Belanja Modal merupakan perbandingan antara Total Belanja Modal dan Total Belanja Daerah. Dengan adanya rasio ini, pembaca laporan diharapkan dapat memahami besarnya alokasi belanja daerah yang digunakan untuk investasi melalui belanja modal pada tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja modal ini dapat memberikan manfaat dalam jangka menengah hingga panjang serta memiliki sifat yang rutin. Umumnya, proporsi antara belanja modal dan belanja daerah berkisar antara 5-20%. Rasio belanja ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan berguna untuk menilai apakah pemerintah daerah mengalami peningkatan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif dalam tahun anggaran tertentu atau selama beberapa periode anggaran (Mahmudi, 2016). Rasio ini mengevaluasi sejauh mana pemerintah daerah mampu mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah diraih dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan mengetahui pertumbuhan masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, hal ini dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu diperhatikan (Abdul Halim, 2012).

$$r = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD } X_n - (X_{n-1})}{\text{Realisasi Penerimaan PAD } X_{n-1}}$$

Keterangan:

X_n = Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja Modal/Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-n

X_{n-1} = Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja Modal/Belanja Operasi yang dihitung pada tahun sebelumnya (tahun sebelum n).

Rasio Kemandirian

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) mencerminkan sejauh mana suatu daerah mampu membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dengan mengandalkan pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan. Rasio ini diukur dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain, seperti Pendapatan Transfer, yang mencakup bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak dari sumber daya alam, Dana Alokasi Umum dan Alokasi Khusus, serta dana darurat dan pinjaman (Abdul Halim, 2012). Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan PAD sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Tabel 1 Rasio Efektivitas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Anggaran PAD	Realisasi PAD	REPAD	Kategori
2019	6.284.220.582.270	5.763.154.073.091	91,70%	Cukup Efektif
2020	5.434.682.028.854	5.531.237.378.774	101,77%	Sangat Efektif
2021	6.279.786.774.225	6.402.714.086.506	101,95%	Sangat Efektif
2022	7.261.199.485.228	7.258.018.251.932	99,95%	Cukup Efektif

Sumber : Data Diolah penulis, 2025



Analisis Rasio Efisiensi

Tabel 2 Rasio Efisiensi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah	REKD	Kategori
2019	13.527.855.950.251	13.081.482.296.509	103,41%	Tidak Efisien
2020	10.935.643.264.218	12.916.359.750.491	84,66%	Cukup Efisien
2021	13.225.393.166.670	14.034.036.626.479	94,23%	Kurang Efisien
2022	12.509.062.821.349	12.594.412.688.862	99,32%	Kurang Efisien

Sumber : Data Diolah penulis, 2025

Analisis Rasio Efisiensi Pendapatan Daerah (REKD) periode 2019-2022 menunjukkan variasi dalam efisiensi penggunaan anggaran daerah. Pada 2019, rasio efisiensi tercatat 103,41%, mengindikasikan ketidakefisienan karena belanja daerah melebihi pendapatan. Namun, pada 2020, rasio menurun menjadi 84,66%, mencerminkan peningkatan efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Rasio efisiensi kembali meningkat pada 2021 menjadi 94,23%, dan mencapai 99,32% pada 2022, mendekati keseimbangan antara belanja dan pendapatan. Secara keseluruhan, fluktuasi ini mencerminkan dinamika kinerja pemerintah daerah dalam mengelola anggaran, yang memerlukan perhatian lebih terhadap pengendalian biaya dan optimalisasi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Analisis Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah mampu mengatur prioritas alokasi anggarannya secara efisien antara belanja operasional dan belanja pembangunan. Semakin besar proporsi anggaran yang dialokasikan untuk belanja operasional, semakin kecil pula dana yang tersedia untuk belanja pembangunan yang berfungsi dalam penyediaan fasilitas dan infrastruktur ekonomi bagi masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun belanja operasional penting untuk memastikan kelancaran kegiatan pemerintahan sehari-hari, pengurangan alokasi untuk belanja pembangunan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. Dengan demikian, rasio keserasian digunakan sebagai alat evaluasi untuk menilai keseimbangan antara belanja operasional dan belanja pembangunan, dengan tujuan agar pemerintah daerah dapat mengelola anggaran secara bijaksana dan proporsional. Melalui pengelolaan yang seimbang, diharapkan pemerintah dapat tetap mendukung pembangunan jangka panjang tanpa mengabaikan kebutuhan operasional rutin pemerintahan.

Tabel 3 Rasio Belanja Operasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Belanja Operasi		
	Belanja Operasi	Belanja Daerah	RK
2019	8.901.819.386.761	13.527.855.950.251	65,80%
2020	8.287.005.336.992	10.935.643.264.218	75,77%
2021	9.509.003.885.719	13.225.393.166.670	71,89%
2022	7.582.911.612.511	12.509.062.821.349	60,61%

Sumber : Data Diolah penulis, 2025

Tabel 4 Rasio Belanja Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Belanja Modal		
	Belanja Modal	Belanja Daerah	RK
2019	1.335.258.895.237	13.527.855.950.251	9,87%
2020	1.497.944.969.133	10.935.643.264.218	13,70%
2021	1.141.203.699.702	13.225.393.166.670	8,63%
2022	1.775.917.392.367	12.509.062.821.349	14,19%

Sumber : Data Diolah penulis, 2025

Analisis rasio aktivitas belanja daerah periode 2019-2022 menunjukkan bahwa pemerintah daerah cenderung memfokuskan anggarannya pada belanja operasi. Pada 2019, belanja operasi mencapai 65,80%, sementara belanja modal hanya 9,87%, mencerminkan

ketidakseimbangan alokasi anggaran. Pada 2020, proporsi belanja operasi meningkat menjadi 75,77%, dengan belanja modal sedikit naik menjadi 13,70%. Pada 2021 dan 2022, belanja operasi menurun menjadi 71,89% dan 60,61%, sementara belanja modal tetap terjaga pada 8,63%-14,19%. Hasil ini menekankan perlunya keseimbangan yang lebih baik antara belanja operasi dan belanja modal untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Analisis Rasio Pertumbuhan

Tabel 5 Rasio Pertumbuhan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Realisasi PAD	RP
2019	5.763.154.073.091	0,02
2020	5.531.237.378.774	-0,04
2021	6.402.714.086.506	0,15
2022	7.258.018.251.932	0,13

Sumber : Data Diolah penulis, 2025

Analisis Rasio Kemandirian

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pendapatan yang bersumber dari pihak eksternal, khususnya Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Semakin tinggi nilai rasio ini, semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan eksternal, yang berarti daerah memiliki kemampuan keuangan yang lebih baik dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri.

Tabel 6 Rasio Kemandirian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Periode	PAD	Pendapatan Transfer	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Predikat	Pola Hubungan
2019	5.763.154.073.091	7.300.647.588.241	79%	Tinggi	Delegatif
2020	5.531.237.378.774	7.347.748.112.410	75%	Sedang	Partisipatif
2021	6.402.714.086.506	7.518.180.471.987	85%	Tinggi	Delegatif
2022	7.258.018.251.933	5.250.014.270.033	138%	Tinggi	Delegatif

Sumber: Diolah Penulis, 2025

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) periode 2019 hingga 2022. Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah mengalami fluktuasi, dengan tren positif dalam efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkat dari tahun ke tahun, meskipun terdapat tantangan seperti pandemi COVID-19 yang mempengaruhi pengelolaan anggaran pada tahun 2020 dan 2021. Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan, mengindikasikan bahwa daerah ini semakin mampu membiayai kegiatan pemerintahannya tanpa bergantung pada dana transfer dari pusat.

Namun, meskipun ada perbaikan dalam beberapa aspek, masih terdapat ketidakseimbangan antara belanja operasional dan belanja modal yang perlu mendapat perhatian lebih. Belanja operasional yang lebih dominan dibandingkan belanja modal dapat menghambat pencapaian pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan. Selain itu, meskipun rasio efektivitas PAD berada pada kategori yang baik, pencapaian realisasi pendapatan masih perlu ditingkatkan lebih lanjut untuk mengurangi ketergantungan pada transfer pusat dan meningkatkan kemandirian fiskal daerah.



Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa langkah penting dapat diambil untuk meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pertama, perlu adanya peningkatan alokasi anggaran untuk belanja modal dengan mengalihkan sebagian besar anggaran dari belanja operasional, agar dapat mendukung pembangunan infrastruktur jangka panjang dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, diversifikasi sumber pendapatan daerah, khususnya dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlu dilakukan melalui pemanfaatan potensi ekonomi lokal dan peningkatan efektivitas pemungutan pajak serta retribusi daerah. Langkah ini akan mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan anggaran sangat dianjurkan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Terakhir, penting untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang keuangan daerah melalui pelatihan yang berfokus pada akuntansi pemerintah dan manajemen keuangan, agar proses pengelolaan anggaran dapat dilakukan dengan lebih efektif dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Dengan implementasi saran-saran ini, diharapkan dapat tercapai pengelolaan anggaran yang lebih baik, serta peningkatan kemandirian fiskal di Provinsi Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi. (2018). *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Afnan, L., Islam, U., & Walisongo, N. (2020). *PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPSTP) KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN Pendahuluan publik semakin meningkat , hal tersebut memicu tumbuhnya sarang inefisiensi , sumber kebocoran dana serta institusi yang*. 1(1), 14–35.
- Chrisna, H. (2024). *Analisis kinerja pengelolaan anggaran APBD kota Medan tahun 2019–2023*. *Jurnal Riset Ilmu Pendidikan*, 4(1), 34–43.
- Habiburrahman, & Imani, R. (2016). Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Kota Bandar Lampung. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 6(2), 1–20.
- Halim, Abdul. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, Abdul. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi 3 Cet 2*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Penerbit UPP STIM YKPN
- Nasution, A. P. (2018). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Transfer Pemerintah Pusat Dan Efisiensi Belanja Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 9(1), 192-206.
- Nasution, D. A. D., & Junawan. (2019). Analisis Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara. *Peningkatan Kemandirian Teknologi Dan Bisnis Untuk Pembangunan Wilayah Pesisir*, 202–211.
- Riswati, & Bukhori, Y. (2023). Analisis Rasio Keserasian Belanja Modal Dan Operasional Serta Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Di Pemerintahan Daerah Kota Bandung. *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, 10(1), 41–55. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP>
- Saputra, R., Ramzija, R., & Akmal, S. (2020). Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba. *Tangible Journal*, 5(1), 43–57. <https://doi.org/10.47221/tangible.v5i1.103>

Sofyan, S. (2022). *Analisis kinerja keuangan daerah Pemerintah Provinsi Banten tahun 2015–2019* (Skripsi). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.